

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Tahun 2026



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 ini.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 merupakan dokumen selama 1 (satu) tahun ke depan yang berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dan merupakan penjabaran per tahun dari Renstra Sekretariat Daerah. Selain itu penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 juga merupakan pemenuhan kewajiban pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peran Sekretariat Daerah yang sangat penting dalam pembangunan, membantu Bupati dan Wakil Bupati, harus dapat mendukung kinerja pembangunan daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan dinamika pembangunan, tentunya kebijakan dan program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini diharapkan nilai strategis dalam upaya peningkatan kinerja Sekretariat Daerah dapat ditingkatkan.

Batusangkar,

2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,



ABDURRAHMAN HADI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	5
1.3.Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN BERKENAAN	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	47
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	53
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	55
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	62
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH	63
3.1 Telahaan terhadap Kebutuhan Provinsi	63
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah	65
3.3 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah	67
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	76
BAB VI PENUTUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025 Triwulan II	17
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar	49
Tabel 2.3	Review Terhadap RKPD Tahun 2026 Kabupaten Tanah Datar	56
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah	63
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026	68
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026	71
Tabel 4.1	Rincian Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026	99

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Alir Hubungan antara RPJPD, RPJMD, RENSTRA OPD dan RENCANA KERJA OPD	5
Bagan 3.1	Alur Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Akhir Dokumen Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD.

Rancangan Akhir Dokumen Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2, ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (RPJM), maupun perencanaan tahunan (RENJA) sehingga perencanaan tahunan perangkat daerah harus mempedomani perencanaan di atasnya yaitu RPJP dan RPJMD.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Ranwal Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang disusun pada tahun berjalan untuk pelaksanaan tahun berikutnya. Rankhir Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju. Kebijakan Program dan Kegiatan dituangkan dalam Renja Tahun

2026 merupakan dokumen perencanaan dengan substansinya menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah.

Penyusunan Rankhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan Renja

Persiapan penyusunan Renja meliputi pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi dan preview mengenai rancangan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan secara beriringan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;

- d. Menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - e. Menelaah rancangan awal RKPD;
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang sinergi dengan tujuan dan sasaran Daerah;
 - g. Menelaah usulan program dan kegiatan ;
 - h. Perumusan kegiatan prioritas;
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah.
3. Pelaksanaan Forum Internal Perangkat Daerah
- Forum Internal Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi Bagian untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan azas demokratisasi dan desentralisasi. Dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah pelaksanaan forum konsultasi publik dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi, adapun tujuan dari pelaksanaan forum internal adalah:
- a. Memfasilitasi persoalan Daerah yang dihadapi oleh Bagian;
 - b. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Bagian.
4. Penetapan Renja
- Penetapan renja merupakan proses verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. Penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh kepala Perangkat Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah

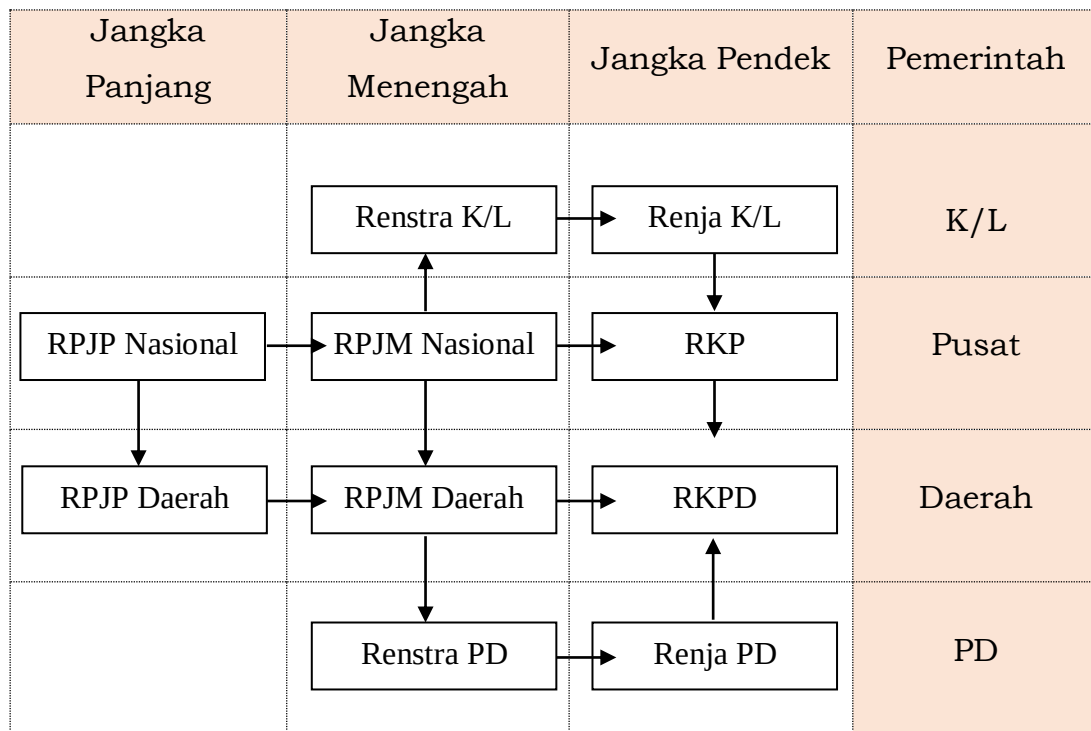
dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disusun mengacu pada Rancangan Akhir Renja yang telah disampaikan sebelumnya yang merupakan bahan untuk forum internal dengan Bagian-Bagian. Selain itu Rancangan Akhir Renja ini juga akan berpedoman pada Rancangan Akhir RKPD untuk mensinkronkan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan Akhir RKPD. Kemudian Rancangan Akhir Renja akan menjadi Renja yang berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.

Selain itu penyusunan Renja juga tidak terlepas dari hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran program dan kegiatan tahun sebelumnya. Khusus kegiatan yang berada pada Sekretariat Daerah tidak banyak dipengaruhi oleh Renja K/L terkait, dan Renja Provinsi, hanya saja informasi tentang rencana di provinsi harus dipertimbangkan untuk mengantisipasi kegiatan provinsi ataupun pemerintah pusat yang melibatkan kabupaten. Yang terpenting dalam penyusunan Ranwal Renja Sekretariat Daerah adalah hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dikaitkan tingkat capaian renstra sampai tahun berjalan dan hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah dalam tahun berjalan sehingga pencapaian target akhir renstra akan dapat dicapai.

Terakhir hasil penyusunan Rancangan Akhir Renja ini ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, akan menjadi bahan untuk perumusan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD.

Berikut bagan alir hubungan antara RPJPD, RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, dan RENJA Perangkat Daerah :



Bagan 1.1

**Alir Hubungan antara RPJPD, RPJMD, RENSTRA PERANGKAT
DAERAH dan RENJA PERANGKAT DAERAH**

1.2. Landasan Hukum

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 disusun berdasarkan perangkat regulasi sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
 21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Kualifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 25. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
 26. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten

- Tanah Datar Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 37);
 34. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Uraian dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah;
 35. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

36. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; dan
37. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 6 Seri D).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja 2026 adalah terjaminnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan prioritas Sekretariat Daerah dalam mendukung suksesnya pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja 2026 ini diantaranya adalah :

1. Menyinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2026;
2. Menjadikan sebagai acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretariat Daerah berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rankhir Renja Sekretariat Daerah, proses penyusunan Rankhir Renja Sekretariat Daerah, keterkaitan antara Rankhir Renja Sekretariat Daerah dengan dokumen RKPD, Rankhir Renstra Sekretariat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Propinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan R-APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Sekretariat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Ranwal Renja Sekretariat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rankhir Renja Sekretariat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun

berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Sekretariat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat Daerah dan/atau realisasi APBD.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu pada bagian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Bagian, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Berisikan uraian mengenai yaitu :

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap RKPD

Berisikan uraian mengenai yaitu :

1. Proses yang membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut; dan
3. Review terhadap RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Bagian ini berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang masuk dalam usulan Bagian-Bagian.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Provinsi

Telahaan terhadap kebijakan Provinsi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Menguraikan program dan kegiatan Sekretariat Daerah dan usulan program dan kegiatan untuk tahun 2026 dengan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Pada Bab ini dijabarkan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah yaitu berisikan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah beserta usulan pendanaan setiap kegiatan dan perkiraan maju untuk tahun 2026.

BAB V PENUTUP

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN BERKENAAN**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Triwulan II
Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah**

Sebagai salah satu instansi publik Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Berdasarkan urusan dan program pemerintahan yang dilimpahkan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar telah diselenggarakan belanja menurut kegiatan yang dijabarkan dalam bentuk sub kegiatan.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 perlu adanya tahap-tahap dalam perencanaan rencana kerja (renja) Sekretariat Daerah. Salah satunya adalah evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya (n-2) yaitu tahun 2023. Evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana program/kegiatan, dan hasil rencana program/kegiatan. Untuk dapat mengevaluasi secara komprehensif maka dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 harus memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang telah, sedang dan akan dicapai;
- c. Sasaran dan prioritas strategis untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan untuk melaksanakannya;
- e. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;

f. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 yang telah direvisi, ada 2 tujuan dan 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada Rencana Kinerja Tahun 2023 terdapat 3 program dan 19 kegiatan dan mayoritas kegiatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Evaluasi renja dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, sedangkan untuk renja tahun 2024, belum dilakukan evaluasi karena kegiatan sedang berjalan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat dari berbagai indikator kinerja pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025 Triwulan II

No	TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/Kegiatan/Su- b. Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (11/10)	13	14=(8+11+13)	11~14/7
			4	1							52%			
					SEKRETARIAT DAERAH									
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien		4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			27%			
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah	4	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Sekretariat Daerah			66%			
			4	1	1	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen	12 Dokumen	78%	18 Dokumen	44 Dokumen	169%
			4	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	7 Dokumen	63%	8 Laporan	20 Laporan	667%
			4	1	1	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen	18 Dokumen	56%	16 Laporan	63 Laporan	371%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah	4	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah			50%			
			4	1	1	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/Bulan	180 Orang/Bulan	100%	114 Orang/ Bulan	408 Orang/ Bulan	355%
			4	1	1	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Dokumen	10363 Dokumen	0%	1 Dokumen	10366 Dokumen	1036600%
			4	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2 Laporan	50%	2 Laporan	5 Laporan	250%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah	4	1	1	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah			5%			
			4	1	1	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20 Orang	5%	20 Orang	41 Orang	410%

		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah	4	1	1	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah				0%			
			4	1	1	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0%	1 Paket	2 Paket	200%
			4	1	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0%	1 Paket	2 Paket	200%
			4	1	1	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0%	1 Paket	2 Paket	200%
			4	1	1	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1 Paket	0%	2 Paket	4 Paket	200%
			4	1	1	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	1 Paket	0%	1 Paket	3 Paket	300%
			4	1	1	2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	0%	1 Dokumen	51 Dokumen	5100%
			4	1	1	2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0%	1 Laporan	2 Laporan	200%
			4	1	1	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan jumlah rapat koordinasi ke luar daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0%	1 Laporan	2 Laporan	200%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah	4	1	1	3	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah				100%			
			4	1	1	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	200%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah	4	1	1	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah				0%			
			4	1	1	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	15 Unit	0%	2 Unit	3 Unit	150%
			4	1	1	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	0	0	0%	2 Unit	0 Unit	0%
			4	1	1	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	5 Unit	1 Unit	0%	6 Unit	6 Unit	100%
			4	1	1	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	9 Unit	9 Unit	0%	22 Unit	31 Unit	155%
			4	1	1	2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Baru Kantor Bupati	0	0	0	0%	-	-	0%

		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah	4	1	1	2	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah					0%					
			4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	2 Laporan	200%
			4	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	2 Laporan	200%
			4	1	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	2 Laporan	200%
			4	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	2 Laporan	20000%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah	4	1	1	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah						0%				
			4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak Kendaraan Dinas atau Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	101 Unit	100 Unit	100 Unit	101 Unit	0 Unit	0%	101 Unit	201 Unit	199%
			4	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	101 Unit	100 Unit	100 Unit	106 Unit	0 Unit	0%	106 Unit	206 Unit	206%
			4	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	3 Unit	3 Unit	22 Unit	0 Unit	0%	22 Unit	25 Unit	833%
			4	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	0 Unit	0%	10 Unit	20 Unit	200%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah	4	1	1	2	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						50%				
			4	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%	2 Orang/Bulan	6 Orang/Bulan	300%
			4	1	1	2	2	Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakain Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	0 Paket	0%	6 Paket	12 Paket	200%
			4	1	1	2	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	8 Orang	0 Orang	8 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	0%	8 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	200%
			4	1	1	2	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%	2 Orang/Bulan	6 Orang/Bulan	300%

2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	1	1	2		Penataan Organisasi	Nilai SAKIP									
									Persentase penataan organisasi yang dilaksanakan					22%				
			4	1	1	2	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	1 Dokumen	10%	10 Dokumen	21 Dokumen	2100%
			4	1	1	2	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	372 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	2 Laporan	1%
			4	1	1	2	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	4 Dokumen	133%
			4	1	1	2	4	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	4 Dokumen	133%
			4	1	1	2	5	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	300%
															0%			
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah	4	1	1	2		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan									
			4	1	1	2	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	750 Laporan	564 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	751 Laporan	75100%
			4	1	1	2	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1000 Laporan	534 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	1001 Laporan	100100%
			4	1	1	2	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	1000 Laporan	776 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	1001 Laporan	100100%
3	Meningkatkan Aktifitas Pembangunan Bidang Keagamaan, Adat, dan Kebudayaan Sesuai Nilai ABS-SBK		4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						113%			
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah	4	1	2	2		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi pemerintahan						78%			
			4	1	2	2	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	67%	6 Dokumen	16 Dokumen	26667%
			4	1	2	2	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	67%	6 Dokumen	17 Dokumen	283%
			4	1	2	2	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	300%

		Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat	4	1	2	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat						0%			
			4	1	2	2	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
			4	1	2	2	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
			4	1	2	2	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah	4	1	2	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana						344%			
			4	1	2	2	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	13 Produk Hukum	5 Dokumen	46 Dokumen	25 Dokumen	0/8 perda/perbub	32%	25 Dokumen	48 Dokumen	369%
			4	1	2	2	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	2 Kasus	200%	1 Kasus	4 Kasus	400%
			4	1	2	2	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0/8 perda/perbub	800%	1 Dokumen	10 Dokumen	1000%
			4	1	2	2		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah						30%			
			4	1	2	2	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	25 Dokumen	39 Dokumen	20 Dokumen	12 Dokumen	60%	20 Dokumen	67 Dokumen	335%
			4	1	2	2	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	10 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	0%	4 Laporan	14 Laporan	1400%

[illegible]

Tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja kegiatan Renstra sampai dengan tahun berjalan (2025) adalah 52.00% sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan mendasar dalam penentuan indikator capaian kegiatan akan sangat berpengaruh kepada indikator hasil (*outcome*) dari kegiatan yang dimaksud yang pada akhirnya akan memengaruhi hasil capaian program.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja secara optimal adalah :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas dalam menetapkan target capaian secara tepat untuk masing-masing kegiatan dan merealisasikan target-target tersebut.
2. Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi untuk pencapaian target yang ditetapkan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan baik secara fisik keuangan maupun administrasi.

Adapun capaian program/kegiatan/sub kegiatan dan evaluasi terhadap akuntabilitas program/kegiatan/sub kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program ini memiliki 10 kegiatan yang mendukung terlaksananya program tersebut yaitu;

- A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dilihat dari Lapkin/LKJIP)

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2024 capaian target untuk kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah, jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan target 100%, ditahun 2024 hasil kegiatan dapat dicapai 100% dan di tahun 2025 juga tercapai 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp78586000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 78% dan realisasi keuangan sebesar Rp33282650,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau 49.49%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp41523602,00 (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 65% dan realisasi keuangan sebesar Rp14644600,00 (empat belas juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) atau 37.54%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp17448915,00 dengan realisasi fisik sebesar 60% dan realisasi keuangan sebesar Rp5332500,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 40.31%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil Evaluasi kinerja perangkat daerah.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari

kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 100%, ditahun 2024 hasil kegiatan dapat dicapai 100% dan diharapkan tahun 2025 juga tercapai 100%. Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2024 sebesar Rp14825462826,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 57.13% dan realisasi keuangan sebesar Rp7520511434,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) atau 50.73%. Keluaran sub kegiatan ini jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp11936200,00 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 65% dan realisasi keuangan sebesar Rp3430600,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) atau 28.74%. Keluaran sub kegiatan ini jumlah laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

c. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp8053708,00 (delapan juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 65.10% dan realisasi keuangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0%. Keluaran sub kegiatan ini jumlah laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2024 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia dengan target 100%, ditahun 2025 hasil kegiatan dapat dicapai 40% dan diharapkan di tahun 2025 juga tercapai 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp25240000,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 5% dan realisasi keuangan sebesar Rp1459000,00 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau 7.21%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 8 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2024 capaian target untuk kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 100%, ditahun

2024 hasil kegiatan dapat dicapai 91% dan diharapkan di tahun 2025 juga tercapai 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp75000000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 49% dan realisasi keuangan sebesar Rp32926000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua enam ribu rupiah) atau 43.90%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp179081000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 37% dan realisasi keuangan sebesar Rp55978500,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau 31.26%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp291594233,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 62% dan realisasi keuangan sebesar Rp159193834,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) atau 54.59%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp.223050500,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima puluh ribu

lima ratus rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 19% dan realisasi keuangan sebesar Rp18434400,00 (delapan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau 8.26%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.

- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp158968000,00 (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 49% dan realisasi keuangan sebesar Rp65235000,00 (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau 41.04%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.

- f. Fasilitas Kunjungan Tamu

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp3116846591,00 (tiga milyar seratus enam belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 63% dan realisasi keuangan sebesar Rp1964830975,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 63.07%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu.

- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2024 sebesar Rp1348607492,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 90% dan realisasi keuangan sebesar Rp589399181,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau 87.73%. Keluaran sub kegiatan ini

adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2024 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan, jumlah paket mebel yang disediakan, dan jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan target 100%, ditahun 2024 hasil program dapat dicapai 95% dan diharapkan di tahun 2025 juga tercapai 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp2457440000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 60% dan realisasi keuangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan.

b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp964000000,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 5% dan realisasi keuangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan.

c. Pengadaan Mebel

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp700000000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 9% dan realisasi keuangan sebesar Rp15431757,00 (lima belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 2.20%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan.

d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp860000000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 15% dan realisasi keuangan sebesar Rp41664544,00 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) atau 4.93%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki 4 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2024 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 100%, ditahun 2024 hasil kegiatan dapat dicapai 98% dan diharapkan di tahun 2025 juga tercapai 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp20479500,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi fisik sebesar

40% dan realisasi keuangan sebesar Rp6514000,00 (enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) atau 31.81%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp972400000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp459734646,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) atau 47.28%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp593262200,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp274797500,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau 46.32%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp888126901,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 54% dan realisasi keuangan sebesar Rp434591250,00 (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua lima puluh rupiah) atau 49.04%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 4 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2024 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, dan jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 100%, ditahun 2024 hasil kegiatan dapat dicapai 82% dan diharapkan di tahun 2025 juga tercapai 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp4377426113,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus sebelas ribu tiga rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 47% dan realisasi keuangan sebesar Rp1801242067,00 (satu milyar delapan ratus satu juta dua ratus empat puluh dua ribu enam puluh tujuh rupiah) atau 41.15%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp79988592,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan dua rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 59% dan realisasi keuangan sebesar Rp35028700,00 (tiga puluh lima juta dua puluh delapan

ribu tujuh ratus rupiah) atau 43.79%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp200000000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 54% dan realisasi keuangan sebesar Rp.98717500,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) atau 49.36%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp75493200,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp33205500,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau 43.98%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

H. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan ini memiliki 4 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan, jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan target 100%, ditahun 2025

hasil kegiatan dapat dicapai 75% dan diharapkan di tahun 2025 juga tercapai 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp240159474,00 (dua ratus empat puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 57.13% dan realisasi keuangan sebesar Rp93957574,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 39.12%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp436000000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 58% dan realisasi keuangan sebesar Rp223135702,00 (dua ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua rupiah) atau 51.20%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan.

c. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp40000000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 5% dan realisasi keuangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah.

d. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp2861589669,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 66% dan realisasi keuangan sebesar Rp1279640276,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 61.40%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.

I. Penataan Organisasi

Kegiatan ini memiliki 5 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, dan jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi dengan target 100%, ditahun 2025 hasil kegiatan dapat dicapai 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp30642743,00 (tiga puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp9620750,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 41.92%. Keluaran sub kegiatan ini jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan.

b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp138320545,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 61% dan realisasi keuangan sebesar Rp55785900,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) atau 60.88%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana.

c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp33788357,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 78.15% dan realisasi keuangan sebesar Rp21137960,00 (dua puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau 85.86%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.

d. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp15021590,00 (lima belas juta dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp3267150,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) atau 50.18%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana.

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp24899542,00 (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 95% dan realisasi keuangan sebesar

Rp19980000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 88.41%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah.

J. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan, jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan, dan jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Fasilitasi Keprotokolan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp473180557,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 60% dan realisasi keuangan sebesar Rp172249860,00 (sertaus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enampuluh rupiah) atau 58.18%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan.

b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp589175155,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 45% dan realisasi keuangan sebesar Rp88692600,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) atau 30.02%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan.

c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp490272488,00 (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar Rp199792541,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) atau 71.14%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan.

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini memiliki 4 kegiatan yang mendukung terlaksananya program tersebut yaitu;

A. Administrasi Tata Pemerintahan

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan, jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan, dan jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Penataan Administrasi Pemerintahan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp20988126,00 (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 66.70% dan realisasi keuangan sebesar Rp5783900,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) atau 36.03%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan.

b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp41294507,00 (empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 66.70% dan realisasi keuangan sebesar Rp10655705,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah) atau 36.24%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan.

c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp865440255,00 (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 95% dan realisasi keuangan sebesar Rp271809763,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) atau 58.56%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

B. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan kb, dan jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp5336632635,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp1189871084,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah) atau 22.30%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual.

b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp10000000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan kb.

c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp5000000,00 (lima juta rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas.

C. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah produk hukum daerah yang disusun, jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum, dan jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp100000000,00 (seratus juta rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 41% dan realisasi keuangan sebesar Rp20514705,00 (dua puluh juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus lima rupiah) atau 41.03%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah produk hukum daerah yang disusun.

b. Fasilitasi Bantuan Hukum

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp395200000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 24% dan realisasi keuangan sebesar Rp81691150,00 (delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) atau 24.21%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum.

c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp73263040,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 43% dan realisasi keuangan sebesar Rp26864505,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima rupiah) atau 43.05%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah

produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi.

D. Fasilitasi Kerjasama Daerah

Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri, dan jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp13188000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 60% dan realisasi keuangan sebesar Rp0,00 Rp0,00 (nol rupiah) atau 0%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri.

b. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp2000000,00 (dua juta rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama.

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini memiliki 4 kegiatan yang mendukung terlaksananya program tersebut yaitu;

A. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari

kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian, dan jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp45941836,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 56% dan realisasi keuangan sebesar Rp4836200,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau 11.74%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD.

b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp78520224,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 60% dan realisasi keuangan sebesar Rp39113380,00 (tiga puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atau 49.81%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian.

c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp20442276,00 (dua puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp3343250,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh

rupiah) atau 23.76%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

B. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah, jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan, dan jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp43511764,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 53% dan realisasi keuangan sebesar Rp15607300,00 (lima belas juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) atau 40.37%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah.

b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp36489780,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 45% dan realisasi keuangan sebesar Rp13663000,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atau 42.14%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp46314210,00 (empat puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp16661000,00 (seratus enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) atau 39.56%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.

C. Pengelolaan Barang dan Jasa

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa, jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik, dan jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp88068494,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 60% dan realisasi keuangan sebesar Rp38230825,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) atau 50.78%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

b. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp61331780,00 (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp12554800,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh empat

ribu delapan ratus rupiah) atau 21.77%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik.

c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp29749542,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 102% dan realisasi keuangan sebesar Rp10276475,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 94.70%.

Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

D. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2025 capaian target untuk sub kegiatan ini adalah 100%. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, kukm, penanaman modal, tenaga kerja, dan jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah:

a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp22186700,00 (dua puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 45% dan realisasi keuangan sebesar Rp5552650,00 (lima juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau

43.23%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, kukm, penanaman modal, tenaga kerja.

b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2025 sebesar Rp38209280,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 46% dan realisasi keuangan sebesar Rp14755350,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 44.65%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Dengan perubahan pola ini akan membawa dampak bahwa pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang benar-benar terjaring dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan pengkajian terhadap capaian indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut

serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah sangat tergantung kepada :

1. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparatur harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan.
2. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.
3. Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan PD kepada masyarakat.

TABEL 2.2																			
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH																			
SEKRETARIAT DAERAH																			
PROVINSI/KABUPATEN SUMATERA BARAT/TANAH DATAR																			
NO	INDIKATOR KINERJA	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PD					REALISASI/CAPAIAN TAHUN KE					PROYEKSI				CATATAN ANALISIS	
				2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15 Dokumen	8 Dokumen	12 Dokumen	18 Dokumen	20 Dokumen	8 Dokumen	15 Dokumen	18 Dokumen	20 Dokumen	14 Dokumen	8 Dokumen	12 Dokumen	18 Dokumen	20 Dokumen		
2	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	7 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	8 Laporan	7 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	7 Laporan		
3	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	4 Laporan	13 Laporan	16 Laporan	15 Laporan	5 Laporan	0%	16 Laporan	15 Laporan	9 Laporan	5 Laporan	13 Laporan	16 Laporan	15 Laporan		
4	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			117 Orang/Bulan	125 Orang/Bulan	130 Orang/Bulan	114 Orang/Bulan	110 Orang/Bulan	125 Orang/Bulan	117 Orang/Bulan	114 Orang/Bulan	110 Orang/Bulan	114 Orang/Bulan	125 Orang/Bulan	130 Orang/Bulan	114 Orang/Bulan	110 Orang/Bulan		
5	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0	10 Dokumen	10363 Dokumen	5240 Dokumen	6500 Dokumen	10 Dokumen	0	5255 Dokumen	6500 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	10363 Dokumen	5240 Dokumen	6500 Dokumen		
6	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			7 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	15 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		
7	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	0	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
8	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			35 ASN	20 ASN	20 ASN	20 ASN	20 ASN	20 ASN	35 ASN	20 ASN	20 ASN	1 Orang	20 ASN	20 ASN	20 ASN	20 ASN		

9	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Tahun	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	1 Tahun	1 Paket	1 Paket	1 Paket			
10	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket			
11	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Tahun	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Paket%	1 Paket	1 Paket	0 Paket	1 Tahun	1 Paket	1 Paket	1 Paket			
12	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	3 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	0 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	3 Paket			
13	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	1 Tahun	2 Paket	1 Paket	1 Paket	18 Jenis	2 Paket	1 Paket	2 Paket	0 Paket	18 Jenis	2 Paket	1 Paket	1 Paket			
14	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			50 Dokumen	50 Dokumen	50 dokumen	50 Dokumen	10 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	0 Dokumen	50 Dokumen	50 dokumen	50 Dokumen	10 Dokumen			
15	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			3895 Laporan	1199 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1199 Laporan	3895 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1199 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			
16	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1050 Laporan	375 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	375 Laporan	1050 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	375 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			
17	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			14 Unit	1 Unit	0	3 Unit	3 Unit	3 Unit	13 Unit	3 Unit	15 Unit	0 Unit	3 Unit	0	3 Unit	3 Unit			
18	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Paket	2 Unit	5 Paket	5 Paket	5 Paket	2 Unit	1 Paket	5 Paket	7 Unit	0 Unit	2 Unit	5 Paket	5 Paket	5 Paket			
19	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			16 Paket	1 Tahun	9 Paket	9 Paket	9 Paket	1 Tahun	16 Paket	9 Paket	26 Unit	0 Unit	1 Tahun	9 Paket	9 Paket	9 Paket			
20	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	0	2 Unit	0	0	1 Paket	0	0	0	-	1 Paket	2 Unit	0%	0%			
21	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Lapran	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			
22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			

23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12Laporan	8 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	8 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
25	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			94 Unit	4 Unit	100 Unit	106 Unit	106 Unit	3 Unit	94 Unit	106 Unit	106 Unit	0 Unit	3 Unit	100 Unit	106 Unit	106 Unit		
26	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			94 Unit	97 Unit	100 Unit	106 Unit	106 Unit	90 Unit	94 Unit	106 Unit	106 Unit	0 Unit	90 Unit	100 Unit	106 Unit	106 Unit		
27	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Jenis	5 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Jenis	3 unit	0 Unit	3 Paket	3 Paket	3 Jenis	5 paket		
28	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	0	0 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit		
29	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	Menyesuaikan kebutuhan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan		
30	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			6 Paket	2 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	2 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	0 Paket	2 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket		
31	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang	2 Orang	8 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	2 Orang	2 Orang	2 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	2 Orang	8 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	2 Orang		
32	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan		
33	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			39 Dokumen	39 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	41 Dokumen	39 Dokumen	39 Dokumen	16 Dokumen (Perda (1), Perbup (14) dan Anjab (1))	41 Dokumen	1 Dokumen	39 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	41 Dokumen		
34	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			114 laporan	114 laporan	138 Laporan	1 Laporan	372 Laporan	114 laporan	137 Laporan	1 Laporan	50 Laporan	0 Laporan	114 laporan	138 Laporan	1 Laporan	372 Laporan		

35	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	137 Laporan	1 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen		
36	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			137 Dokumen	137 Dokumen	138 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	137 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	137 Dokumen	138 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		
37	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		
38	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			750 Kali	750 Kali	750 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	750 Kali	750 Laporan	750 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	750 Kali	750 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
39	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			1000 Kali	1000 Kali	1000 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1000 Kali	1000 Laporan	1000 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1000 Kali	1000 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
40	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			1000 kegiatan	1000 kegiatan	1000 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1000 kegiatan	1000 Laporan	1000 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1000 kegiatan	1000 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
41	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			7 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Laporan	6 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	6 Laporan	6 laporan	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Laporan	6 Dokumen		
42	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			2 Dokumen	2 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen		
43	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		
44	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			9 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	2 Dokumen	9 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan		
45	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan	1 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		
46	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan	1 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		
47	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			3 ranperda	3 ranperda	25 Produk Hukum	30 Produk Hukum	30 Dokumen	3 ranperda	10 Perda	60 Produk Hukum	46 Produk hukum	0/8 perda/perbub	3 ranperda	25 Produk Hukum	30 Produk Hukum	30 Produk hukum		

48	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Bantuan Hukum			5 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	5 Perkara	2 pidana dan 3 non litigasi	1 perkara	2 Kasus	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 perkara		
49	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			5 Lembaran Daerah dan 5 Berita Daerah	5 Lembaran Daerah dan 5 Berita Daerah	1 Dokumen dan 1 JDIH	1 Dokumen dan 1 JDIH	1 Dokumen	5 Lembaran Daerah dan 5 Berita Daerah	5 Lembaran Daerah dan 5 Berita Daerah serta 1 JDIH	1 Dokumen dan 1 JDIH	1 Dokumen dan 1 JDIH	0/8 perda/perbub	5 Lembaran Daerah dan 5 Berita Daerah	1 Dokumen dan 1 JDIH	1 Dokumen dan 1 JDIH	1 Dokumen		
50	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri			21 Dokumen	16 Dokumen	25 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	16 Dokumen	22 Dokumen	20 Dokumen	41 Dokumen	12 Dokumen	16 Dokumen	25 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen		
51	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			5 Laporan	5 Laporan	10 Dokumen	4 Laporan	1 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	10 Dokumen	4 Laporan	1 Dokumen		
52	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
53	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan		
54	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
55	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 laporan		
56	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	9 Laporan	9 Laporan		
57	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			14 Laporan	14 Bulan	14 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14 Bulan	14 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	14 Bulan	14 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		
58	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	30 Dokumen	35 Dokumen	50 Dokumen	57 Dokumen	30 Dokumen	35 Dokumen	3 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	30 Dokumen	35 Dokumen		
59	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			12 Laporan	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		
60	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			50 Orang	50 Orang	49 Orang	49 Orang	49 orang	50 Orang	50 Orang	49 Orang	49 orang	50 Orang	50 Orang	49 Orang	49 Orang	49 orang		
61	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
62	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sangat ditentukan oleh faktor-faktor pendukung seperti SDM aparatur, sarana dan prasarana pendukung maupun sistem kerja kondusif.

Isu-isu penting yang masih dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja adalah :

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai berikut :
 - a. Jumlah dan kapasitas ASN belum memenuhi tuntutan tugas sesuai kompetensi dan beban kerja;
 - b. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - c. Belum optimalnya pemenuhan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan publik;
 - d. Terbatasnya ketersediaan anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional dari permasalahan dan hambatan di atas adalah lambatnya waktu dalam penyelesaian pekerjaan akibat kurangnya SDM yang terlatih dan mekanisme serta pola kerja yang tidak berdasarkan SOP membuat tujuan akhir pekerjaan yang bermuara pada pencapaian pelayanan kinerja Sekretariat Daerah menjadi terhambat. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang memiliki limit waktu tidak lama ini akan berdampak terhadap lambatnya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan perkembangan Daerah.
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah adalah :

- a. Tuntutan terhadap peningkatan profesionalitas ASN melalui peningkatan indeks profesionalitas ASN (IP ASN);
 - b. Penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan mengedepankan inovasi;
 - c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas secara efektif, efisien dan akuntabel.
4. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah adalah :
- a. SIREMON LAKON (Sistem Informasi Registrasi Monitoring dan Laporan Kontrak)
- Aplikasi SIREMON LAKON digunakan untuk pendaftaran registrasi secara elektronik untuk kontrak kerja antara Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan pihak ketiga sebagai persyaratan pembayaran di BPKD dan untuk inventarisasi seluruh kegiatan yang digunakan untuk pengendalian kegiatan program pembangunan.

2.4. Review Terhadap RKPD

Pada RKPD Tahun 2026 terdapat 3 (tiga) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, yang terdistribusi ke dalam 10 (sepuluh) bagian yang ada di Sekretariat Daerah, sebagaimana pada tahun 2024 juga terdapat 3 (tiga) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan.

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2026
PROVINSI/KABUPATEN SUMATERA BARAT/TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

KODE REKENING				RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING	
				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	1			SEKRETARIAT DAERAH					43,557,332,786	SEKRETARIAT DAERAH					59,384,275,855		
4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	37,989,301,446	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	49,739,972,117		
4	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	119,493,158	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	131,442,474	146,294,616	
4	1	1	2	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	67,256,400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	73,982,040	
4	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	39,009,301	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	42,910,231	
4	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	13,227,457	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	14,550,203	
4	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	12,750,267,069	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	14,025,293,776		
4	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/Bulan	12,736,765,122	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/Bulan	14,010,441,634	
4	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6500 Dokumen	1,565,747	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6500 Dokumen	1,722,322	
4	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	11,936,200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	13,129,820	
4	1	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	20,240,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	229,900,000		
4	1	1	2.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tanah Datar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 ASN	20,240,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tanah Datar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		229,900,000	

4	1			2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	4,748,135,655	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	9,284,009,845		
4	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	75,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	208,997,030
4	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	179,081,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	437,000,000
4	1	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	291,594,233	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	498,267,000
4	1	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3 Paket	36,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3 Paket	36,500,000
4	1	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	106,550,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	200,139,500
4	1	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 Dokumen	158,968,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 Dokumen	209,836,000
4	1	1	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan tamu	1 Laporan	2,774,974,600	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan tamu	1 Laporan	4,884,979,000
4	1	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,125,467,322	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2,808,291,315
4	1	1	3.1		Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	18,570,259	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	82,500,000		
4	1	1	3.1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	18,570,259	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	82,500,000
4	1	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6,604,290,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,668,767,870		
4	1	1	2.1	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	2,457,440,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	
4	1	1	2.1	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0%	964,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0%	
4	1	1	2.1	5	Pengadaan Mebel	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Mebel	5 Paket	285,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Mebel	5 Paket	847,000,000
4	1	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Paket	97,850,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Paket	821,767,870
4	1	1	2.1	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0%	2,800,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0%	
4	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2,497,589,525	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3,241,587,900		
4	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20,479,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	27,487,900
4	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	972,400,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1,320,000,000
4	1	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	593,262,200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	793,000,000
4	1	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	911,447,825	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1,101,100,000

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	6,197,383,838	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	12,389,321,113	
4	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106 Unit	3,745,902,046	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106 Unit	4,843,321,113	
4	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106 Unit	79,988,592	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106 Unit	165,000,000	
4	1	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Paket	200,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Paket	451,000,000	
4	1	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit	2,171,493,200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Datar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit	6,930,000,000	
4	1	1	2.1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	4,163,217,549	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	5,097,832,290	
4	1	1	2.1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	770,941,049	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	844,059,290	
4	1	1	2.1	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Paket	435,836,500	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Paket	495,000,000	
4	1	1	2.1	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	40,000,000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	44,000,000	
4	1	1	2.1	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2,916,440,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	3,714,773,000	
4	1	1	2.1		Penataan Organisasi		Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi		100%	168,310,838	Penataan Organisasi		Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi		100%	1,460,000,000	
4	1	1	2.1	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	41 Dokumen	22,952,471	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	41 Dokumen	250,000,000.00	
4	1	1	2.1	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	372 Laporan	91,629,401	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	372 Laporan	900,000,000	
4	1	1	2.1	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	24,618,400	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	110,000,000.00	
4	1	1	2.1	4	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	3 Dokumen	6,510,795	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	3 Dokumen	50,000,000	
4	1	1	2.1	5	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	3 Dokumen	22,599,771	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	3 Dokumen	150,000,000	

4	1	1	2.1		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	701,803,555	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	2,129,316,849			
4	1	1	2.1	1	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	267,380,028	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	538,561,557	
4	1	1	2.1	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	209,641,233	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	792,999,110	
4	1	1	2.1	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Pendokumentasian Laporan Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	224,782,294	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	797,756,182	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	5,131,378,742	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	8,935,694,309			
4	1	2	2		Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	221,425,717	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	1,148,532,023			
4	1	2	2	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	16,053,813	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	201,018,223	
4	1	2	2	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	29,407,004	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	374,000,000	
4	1	2	2	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	175,964,900	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	573,513,800	
4	1	2	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	4,476,257,725	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	6,990,261,465			
4	1	2	2	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	20 Dokumen	4,446,257,725	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	20 Dokumen	6,755,061,465	
4	1	2	2	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	15,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	173,500,000	
4	1	2	2	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1 laporan	15,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1 laporan	61,700,000	
4	1	2	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	424,726,300	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	722,600,821			
4	1	2	2	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	30 Dokumen	50,000,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Tanah Datar	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		30 Dokumen	160,423,477.50	
4	1	2	2	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Tanah Datar	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Perkara	337,494,500	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Tanah Datar	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		1 Perkara	415,877,343.20	
4	1	2	2	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Tanah Datar	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1 Dokumen	37,231,800	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Tanah Datar	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		1 Dokumen	146,300,000	
4	1	2	2		Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	8,969,000	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	74,300,000			
4	1	2	2	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	0%	7,969,000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	0%	60,000,000	
4	1	2	2	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	0%	1,000,000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	0%	14,300,000	

4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	100%	436,652,598	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	100%	708,609,432		
4	1	3	2		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%	133,768,981	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%	147,145,879		
4	1	3	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	41,179,369	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	45,297,306
4	1	3	2	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	78,520,224	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	86,372,246
4	1	3	2	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	14,069,388	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	15,476,327
4	1	3	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	113,195,017	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	367,186,164		
4	1	3	2	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 Dokumen	38,663,082	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 Dokumen	165,000,000
4	1	3	2	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Dokumen	32,421,280	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Dokumen	108,686,164
4	1	3	2	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	42,110,655	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	93,500,000
4	1	3	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	143,800,708	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	143,800,708		
4	1	3	2	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	35 Dokumen	75,284,266	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	35 Dokumen	75,284,266
4	1	3	2	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan secara Elektronik	12 Dokumen	57,664,400	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan secara Elektronik	12 Dokumen	57,664,400
4	1	3	2	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	49 orang	10,852,042	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tanah Datar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	49 orang	10,852,042
4	1	3	2		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	45,887,892	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	50,476,681		
4	1	3	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	12,843,600	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	14,127,960
4	1	3	2	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	33,044,292	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Tanah Datar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	36,348,721

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan

Pada bagian ini dijelaskan bahwa terkait dengan usulan program dan kegiatan secara keseluruhan berasal dari usulan dari bawah (*bottom-up planning*) yang kemudian dihimpun untuk dibahas dan disesuaikan dengan tupoksi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Disamping itu usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut juga melalui tahapan dan mekanisme forum internal Bagian-Bagian.

Musrenbang Tingkat Kabupaten adalah merupakan pembahasan akhir tentang usulan program/kegiatan prioritas yang masuk dari Kecamatan serta masukan dari *stageholder* terkait sehingga didapat kesepakatan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas Kabupaten yang kemudian ditetapkan dan akan direalisasikan melalui APBD Kabupaten Tanah Datar. Beberapa usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang masuk terdapat dalam pengusulan pada Pemerintah Propinsi Sumatera Barat yang nantinya dianggarkan dalam APBD Propinsi. Biasanya usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut yang nantinya bisa terealisasi merupakan program prioritas propinsi atau program yang memang memberikan manfaat banyak kepada masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebutuhan Provinsi

Tujuan dan sasaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Barat 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Pendidikan merata kesehatan berkualitas	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia 2. Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas
2. Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan berbasis keberlanjutan 2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
3. Nagari/Desa sebagai basis kemajuan	Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	1. Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat nagari/desa/kelurahan
4. Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui	1. Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah 2. Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang

Misi	Tujuan	Sasaran
Sumatera bagian barat	penguatan perdagangan, investasi, industri dan inovasi	inklusif dan berkualitas 3. Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah
5. Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim 2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan 3. Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur
6. Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas	Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	1. Memperkuat nilai adat, budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat 2. Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender 3. Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga yang berkualitas
7. Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah 2. Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM
8. Tata kelola pemerintah bersih dan pelayanan publik yang	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan pelayanan publik yang efektif	1. Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas layanan publik dan

Misi	Tujuan	Sasaran
efektif		kinerja daerah keuangan

Penanganan rumah tidak layak huni Program Nasional maupun provinsi pada nantinya tidak luput dari peran kecamatan sebagai unit pemerintahan terendah di Kabupaten Tanah Datar, kecamatan sebagai wilayah pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Nasional, Provinsi dan Kabupaten tentu saja ikut mengawal dengan optimal pencapaian program nasional maupun provinsi tersebut. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD adalah sudah disebutkan pada poin-poin diatas.

Dalam rangka pencapaian visi Kepala Daerah dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka misi Kabupaten Tanah Datar diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya;
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri, dan UMKM;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”***.

Visi ini menggambarkan tentang wujud masa depan yang lebih baik yang didambakan oleh pimpinan daerah dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

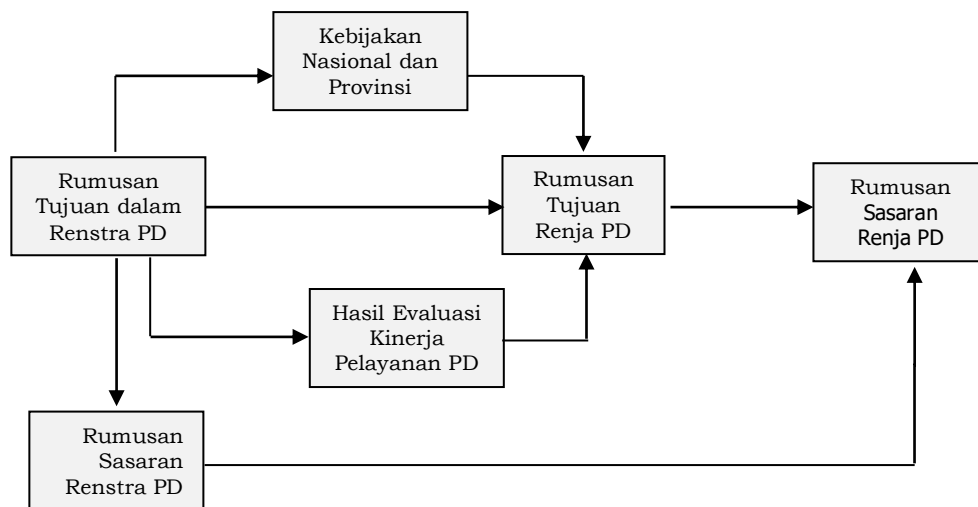
Koordinasi lintas sektor dalam menciptakan sinergitas dan integritas pembangunan di Kabupaten Tanah Datar menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Makna penataan kebijakan dalam visi tersebut memberi implikasi bahwa Sekretariat Daerah menjadi *leading/core unit* dalam proses penyusunan dan pengaturan kebijakan administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sedangkan maksud koordinasi mengandung pengertian Sekretariat Daerah menjadi unit yang menjalankan fungsi koordinasi lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang harus terus diperkuat guna percepatan tujuan pembangunan daerah.

Bagi Sekretariat Daerah hal ini merupakan suatu tantangan yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (***good governance***) yang menerapkan manajemen berbasis kinerja pada sektor publik yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita masyarakat yang lebih maju sejahtera dan berkeadilan yang dilandasi ABS-SBK. Dengan demikian akan tercipta legitimasi dan dukungan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan pada Rencana Kerja PD memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen tersebut adalah RPJMD Kabupaten Tanah Datar.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah

Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana diilustrasikan sebagai berikut :



**Bagan 3.1 Alur Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja
Sekretariat Daerah**

Penetapan tujuan dan sasaran Renja didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Tujuan dan sasaran satu dengan lainnya saling berhubungan menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang akan dicapai, yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Tabel 3.2									
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH									
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan aktifitas pembangunan bidang keagamaan, adat dan	1. Meningkatnya pembangunan keagamaan	1. Nilai zakat yang diterima oleh amil zakat	10,899,359,857.00	11,113,072,796.00	11,326,785,734.00	11,540,498,673.00	12,300,000.00	#####
2.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah	1. Nilai evaluasi SAKIP	71,96	72,39	72,40	71.00	72.25	73.65
			2. Nilai EPPD	2.62	3.1599	3.2996	3,2	3,2	3,2
			3. Persentase pengendalian inflasi daerah dengan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Persentase pemenuhan belanja produk Dalam Negeri	76.78%	76.78%	76.78%	76.78%	60%	60%
			5. Persentase pengendalian dan pengelolaan administrasi kegiatan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			6. Kelembagaan tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Rata-rata indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan	95	95.25	95.3	95.47	96.34	96,34
		4. Meningkatnya kualitas kebijakan	1. IRH (Indeks Reformasi Hukum)	86.2	86.4	86.6	86.85	98.60	93.07
		5. Terwujudnya inovasi berkelanjutan	1. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00

3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten untuk melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan

operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah, pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*). Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja Perangkat Daerah berdasarkan target kinerja yang akan diwujudkan serta dengan mempertimbangkan persentase total belanja pada pengeluaran setiap Perangkat Daerah beberapa tahun sebelumnya sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis.

Program merupakan penjabaran lebih rinci tentang apa yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi/kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hubungannya dengan kegiatan, program merupakan kumpulan dari satu atau lebih kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, khususnya pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 agar mampu memberikan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan

anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yang telah direvisi yaitu 2 tujuan dan 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada Rencana Kinerja Tahun 2026 terdapat 3 program dan 19 kegiatan dan mayoritas kegiatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 tahun ke depan yaitu periode 2025 akan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2026

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BAGIAN PENANGUNGJAWAB	INDIKATOR	KINERJA
1					2	3	4	5
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
4	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
4	1	1	2	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
4	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
4	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4	1	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
4	1	1	2.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
4	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4	1	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
4	1	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
4	1	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
4	1	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4	1	1	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan tamu
4	1	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	1	1	3.1		Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	
4	1	1	3.1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	1	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
4	1	1	2.1	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Umum	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4	1	1	2.1	5	Pengadaan Mebel	Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Mebel
4	1	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
4	1	1	2.1	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Umum	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
4	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
4	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4	1	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	1	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
4	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
4	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4	1	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	1	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4	1	1	2.1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
4	1	1	2.1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perencanaan dan keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	1	1	2.1	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	1	1	2.1	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	1	1	2.1	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Umum	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	1	1	2.1		Penataan Organisasi		Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	
4	1	1	2.1	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4	1	1	2.1	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Organisasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4	1	1	2.1	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4	1	1	2.1	4	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Organisasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana
4	1	1	2.1	5	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Organisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
4	1	1	2.1		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
4	1	1	2.1	1	Fasilitasi Keprotokolan	Protokol dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan
4	1	1	2.1	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Protokol dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
4	1	1	2.1	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Protokol dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan

4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	2	2		Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan
4	1	2	2	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan
4	1	2	2	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
4	1	2	2	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
4	1	2	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4	1	2	2	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4	1	2	2	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
4	1	2	2	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
4	1	2	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4	1	2	2	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah
4	1	2	2	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum
4	1	2	2	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
4	1	2	2		Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah
4	1	2	2	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
4	1	2	2	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan
4	1	3	2		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4	1	3	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
4	1	3	2	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
4	1	3	2	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
4	1	3	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
4	1	3	2	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
4	1	3	2	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
4	1	3	2	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
4	1	3	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	3	2	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PBJ	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	3	2	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	PBJ	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Terkelolanya Layanan Pengadaan secara Elektronik
4	1	3	2	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PBJ	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	3	2		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
4	1	3	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
4	1	3	2	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka disusunlah rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai wujud untuk menentukan tindakan prioritas. Program adalah rangkaian kegiatan utama yang dipaket berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan dan dipilih yang dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Adapun program/kegiatan/sub kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program ini memiliki 11 kegiatan yang mendukung terlaksananya program tersebut yaitu;

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah, jumlah dokumen LKPD Sekretariat Daerah, Nilai LKjIP Sekretariat Daerah, jumlah laporan kegiatan bulanan Sekretariat Daerah dan jumlah orang yang menerima gaji jasa kantor (tenaga administrasi) dengan target 100%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp67256400,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah). Keluaran dari sub kegiatan ini jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang terdiri

dari 18 dokumen diantaranya RKA Induk, DPA Induk, RKA Pergeseran, DPA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA Perubahan, Renstra, Ranwal Renja, Rancangan Renja, Rankhir Renja, Renja Perubahan, PK Induk, PK Perubahan, Cascading, Pohon Kinerja, Croscutting, Rencana Aksi, Evaluasi Renja.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp39009301,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ribu tiga ratus satu rupiah). Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang terdiri dari 7 laporan diantaranya LKjIP, LKPJ, Laporan Kinerja Triwulan 1 s/d 4, SOP pengambilan data kinerja.

c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp13227457,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah). Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Yang terdiri dari 15 laporan antara lain SPIP, PMPRB, SIMBANGDA, PBB.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dan jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp12736765122,00 (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh dua rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, yang terdiri dari 115 Orang/Bulan antara lain 107 ASN dan 8 PPPK.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp1565747,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. Yang terdiri dari 6500 Dokumen antara lain SPJ seluruh bagian.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp11936200,00 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD. Yang terdiri dari 2 laporan antara lain Laporan Semester, Laporan Keuangan.

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp20240000,00 (dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Yang terdiri dari 20 ASN antara lain Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 8 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp75000000,00 (tujuh puluh lima juta). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. Yang terdiri dari 1 paket antara lain belanja Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp179081000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah). Keluaran sub kegiatan ini jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. Yang terdiri dari 1 paket antara lain belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp291594233,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan. Yang terdiri dari 1 paket diantaranya belanja Peralatan Rumah Tangga.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp36500000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan. Yang terdiri dari 2 paket diantaranya belanja pengisian Tabung Pemadam kebakaran dan Gas.

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp106550500,00 (seratus enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan. Yang terdiri dari 1 paket diantaranya belanja Barang Cetak dan Penggandaan.

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp158968000,00 (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan. Yang terdiri dari 50

dokumen diantaranya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

g. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp2774974600,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya laporan kunjungan tamu.

h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp1125467322,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

E. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp18570259,00 (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah.

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki 5 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan, dan jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp2457440000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Keluaran sub kegiatan ini Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan. Yang terdiri dari 3 unit kendaraan diantaranya Mobil dan kendaraan roda dua.

b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp964000000,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah). Keluaran sub kegiatan ini Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Disediakan.

c. Pengadaan Mebel

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp285000000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan. Yang terdiri dari 5 paket.

d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp97850000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan. Yang terdiri dari 9 paket.

e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp2800000000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki 4 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp20479500,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp972400000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp593262200,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) . Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp911447825,00 (sembilan ratus sebelas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 4 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, dan jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp3745902046,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua ribu empat puluh enam rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Yang terdiri dari 106 unit diantaranya laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas.

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp79988592,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Yang terdiri dari 106 unit diantaranya laporan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan.

- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp200000000,00 (dua ratus juta rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Yang terdiri dari 3 jenis diantaranya laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp2171493200,00 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Yang terdiri

dari 10 unit diantaranya laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

I. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan ini memiliki 4 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan, jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp770941049,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang terdiri dari 2 orang/bulan diantaranya Bupati dan Wakil Bupati.

b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp435836500,00 (empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan. Yang terdiri dari 6 Paket diantaranya belanja

Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

c. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp40000000,00 (empat puluh juta rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang terdiri dari 8 Orang/Bulan diantaranya KDH dan WKDH.

d. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp2916440000,00 (dua miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang terdiri dari 2 Orang/Bulan diantaranya penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.

J. Penataan Organisasi

Kegiatan ini memiliki 5 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana, dan jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp22952471,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan. Yang terdiri dari 10 dokumen diantaranya Evaluasi Anjab, Perda SOTK Bappeda dan Rida (Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah, Ranperbup Perangkat Daerah (7 Dokumen), Ranperbup UPTD.

b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp91629401,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya 40 OPD, 14 Kecamatan, 75 Nagari.

c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp24618400,00 (dua puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. Yang terdiri dari 1 Dokumen diantaranya Evaluasi RB Kabupaten.

d. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp6510795,00 (enam juta lima ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana. Yang terdiri dari 3 laporan diantaranya Lapoan Monev (40 OPD, 14 Kecamatan, 75 Nagari), ProBis (Proses Bisnis), TND (Tata Naskah Dinas).

- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp22599771,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah. Yang terdiri dari 3 laporan diantaranya PK, LKJIP, PK Perubahan.

K. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan, jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan, dan jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

- a. Fasilitasi Keprotokolan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp267380028,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dan terfasilitasinya tamu daerah.

- b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp209641233,00 (dua ratus sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya Bahan Komunikasi (Sambutan, Testimoni) dan Kegiatan Dialog / Audiensi.

c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp224782294,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya Kegiatan Pimpinan yang terdokumentasi.

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini memiliki 4 kegiatan yang mendukung terlaksananya program tersebut yaitu;

A. Administrasi Tata Pemerintahan

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan, jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan, dan jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Penataan Administrasi Pemerintahan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp16053813,00 (enam belas juta lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan. Yang terdiri dari 6 laporan diantaranya Laporan Rakor Pimpinan ke Forkopimda, Laporan Rakor Pimpinan ke Provinsi, Laporan Raker Pimpinan ke OPD, Laporan Raker Pimpinan ke provinsi, Rapat Paripurna DPRD, Laporan Trantibbummas dengan Kesbangpol.

b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp29407004,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh

ribu empat rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan. Yang terdiri dari 6 dokumen diantaranya Batas Daerah, Batas Wilayah/Nagari, Rupa Bumi, Topo Nimi, Urusan rantau, Pembinaan Kecamatan.

c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp175964900,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah. Yang terdiri dari 4 dokumen diantaranya LKPJ, LPPD, SPM, RLPPD.

B. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, jumlah Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp4446257725,00 (empat miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual. Yang terdiri dari 2 laporan diantaranya Laporan Keagamaan dan Laporan Baznas.

b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp15000000,00 (lima belas juta rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya Laporan Hasil Pembinaan Remaja Mesjid Kabupaten.

c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp15000000,00 (lima belas juta rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jJumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.

C. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah produk hukum daerah yang disusun, jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum, dan jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp50000000,00 (lima puluh juta rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah produk hukum daerah yang disusun. Yang terdiri dari 30 produk hukum diantaranya Perda dan Perbup.

b. Fasilitasi Bantuan Hukum

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp337494500,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum. Yang terdiri dari 1 perkara diantaranya Litigasi, Non Litigasi.

c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp37231800,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi. Yang terdiri dari 1 Dokumen dan 1 JDIH diantaranya WEB JDIH.

D. Fasilitasi Kerjasama Daerah

Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri, dan jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp7969000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri. Yang terdiri dari 20 dokumen diantaranya Direncanakan akan dilaksanakan 20 Kerjasama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

b. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp1000000,00 (satu juta rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama. Yang terdiri dari 4 laporan diantaranya Laporan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah yang dilakukan pertriwulan.

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini memiliki 4 kegiatan yang mendukung terlaksananya program tersebut yaitu;

A. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian, dan jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil dengan target 85%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp41179369,00 (empat puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya Laporan Kegiatan.

b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp78520224,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh

ribu dua ratus dua puluh empat rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian. Yang terdiri dari 5 laporan Laporan TPID per Triwulan dan Laporan Tahunan TPID.

c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp14069388,00 (empat belas juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Yang terdiri dari 1 laporan diantaranya Laporan Koordinasi dan Pemantauan.

B. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah, jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan, dan jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp38663082,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah. Yang terdiri dari 2 laporan diantaranya Laporan Tahunan/menghadiri rakor perencanaan yang dilaksanakan oleh provinsi/Pusat.

b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp32421280,00(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu

ribu dua ratus delapan puluh rupiah)-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan. Yang terdiri dari 3 laporan diantaranya Laporan DAK Triwulan, Laporan triwulan BKK dan laporan monev.

- c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp42110655,00 (empat puluh dua juta seratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Yang terdiri dari 12 laporan diantaranya Laporan Simbangda.

C. Pengelolaan Barang dan Jasa

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa, jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik, dan jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

- a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp75284266,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Yang terdiri dari 35 dokumen diantaranya SK Tender Tahun 2026 Belanja pengadaan melalui e-purchasing (Katalog Lokal).

b. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2024 sebesar Rp57664400,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik. Yang terdiri dari 12 dokumen diantaranya Dokumen per bulan dalam Tahun Anggaran.

c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp10852042,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh dua rupiah). Keluaran sub kegiatan ini jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Yang terdiri dari 49 orang diantaranya Admin RUP dari OPD se Kabupaten Tanah Datar.

D. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, kukm, penanaman modal, tenaga kerja, dan jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian dengan target 90%.

Sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah;

a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp12843600,00 (dua belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi

kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, kukm, penanaman modal, tenaga kerja. Yang terdiri dari 1 dokumen diantaranya Laporan pelaksanaan kegiatan Monev Tim KP3 dan Koordinasi sektor pertanian.

b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Anggaran untuk sub kegiatan ini tahun 2026 sebesar Rp33044292,00 (tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah). Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian. Yang terdiri dari 1 dokumen diantaranya Laporan pelaksanaan Koordinasi sektor Pertambangan, ESDM dan Lingkungan Hidup.

TABEL 3.4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
PROVINSI/KABUPATEN SUMATERA BARAT/TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CA T.	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1				SEKRETARIAT DAERAH					30,807,065,717				59,435,357,869
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100%	25,239,034,377			100%	48,834,765,813
4	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	119,493,158			100%	119,493,158
4	1	1	2	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Datar	20 Dokumen	67,256,400	DAU		20 Dokumen	67,256,400
4	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Tanah Datar	7 Laporan	39,009,301	DAU		7 Laporan	39,009,301
4	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Tanah Datar	15 Laporan	13,227,457	DAU		15 Laporan	13,227,457
4	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%				100%	12,750,267,069
4	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tanah Datar	110 Orang/Bulan	12,736,765,122	DAU		110 Orang/Bulan	12,736,765,122.00
4	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Tanah Datar	6500 Dokumen	1,565,747	DAU		6500 Dokumen	1,565,747.00
4	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Tanah Datar	2 Laporan	11,936,200	DAU		2 Laporan	11,936,200.00
4	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	20,240,000			100%	229,900,000
4	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Tanah Datar	20 ASN	20,240,000	DAU		20 ASN	229,900,000.00

4	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	4,748,135,655			100%	9,308,791,565
4	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tanah Datar	1 Paket	75,000,000	DAU		1 Paket	208,997,030
4	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Datar	1 Paket	179,081,000	DAU		1 Paket	484,357,720.00
4	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab.Tanah Datar	1 Paket	291,594,233	DAU		1 Paket	498,267,000.00
4	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab.Tanah Datar	3 Paket	36,500,000	DAU		3 Paket	33,000,000.00
4	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Tanah Datar	1 Paket	106,550,500	DAU		1 Paket	200,139,500.00
4	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Tanah Datar	10 Dokumen	158,968,000	DAU		10 Dokumen	190,760,000.00
4	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan tamu	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	2,774,974,600	DAU		1 Laporan	4,884,979,000.00
4	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	1,125,467,322	DAU		1 Laporan	2,808,291,314.73
4	1	1	3		Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			100%	18,570,259			100%	82,500,000
4	1	1	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	18,570,259	DAU		1 Laporan	82,500,000.00
4	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	6,604,290,000			100%	1,668,767,870
4	1	1	2	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tanah Datar	3 Unit	2,457,440,000	DAU		3 Unit	
4	1	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tanah Datar		964,000,000	DAU			
4	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Mebel	Kab.Tanah Datar	5 Paket	285,000,000	DAU		5 Paket	847,000,000.00
4	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tanah Datar	9 Paket	97,850,000	DAU		9 Paket	821,767,870.00
4	1	1	2	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Tanah Datar	0%	2,800,000,000	DAU		0%	

4	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	2,497,589,525			100%	3,238,587,900
4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	20,479,500	DAU		1 Laporan	24,487,900.00
4	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	972,400,000	DAU		1 Laporan	1,320,000,000.00
4	1	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	593,262,200	DAU		1 Laporan	793,000,000.00
4	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	911,447,825	DAU		1 Laporan	1,101,100,000.00
4	1	1	2											
4	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	6,197,383,838			100%	12,319,309,113
4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tanah Datar	106 Unit	3,745,902,046	DAU		106 Unit	4,843,321,113.00
4	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tanah Datar	106 Unit	79,988,592	DAU		106 Unit	94,988,000.00
4	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tanah Datar	5 Paket	200,000,000	DAU		5 Paket	451,000,000.00
4	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Tanah Datar	10 Unit	2,171,493,200	DAU		10 Unit	6,930,000,000.00
4	1	1	2											
4	1	1	2		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			100%	4,163,217,549			100%	5,097,832,289
4	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Tanah Datar	2 Orang/Bulan	770,941,049	DAU		2 Orang/Bulan	844,059,289.00
4	1	1	2	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Tanah Datar	6 Paket	435,836,500	DAU		6 Paket	495,000,000.00
4	1	1	2	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Tanah Datar	2 Orang	40,000,000	DAU		2 Orang	44,000,000.00
4	1	1	2	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Tanah Datar	2 Orang/Bulan	2,916,440,000	DAU		2 Orang/Bulan	3,714,773,000.00

4	1	1	2		Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi			100%	168,310,838			100%	1,770,000,000
4	1	1	2	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab.Tanah Datar	41 Dokumen	22,952,471	DAU		41 Dokumen	270,000,000.00
4	1	1	2	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab.Tanah Datar	372 Laporan	91,629,401	DAU		372 Laporan	1,110,000,000.00
4	1	1	2	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab.Tanah Datar	2 Dokumen	24,618,400	DAU		2 Dokumen	130,000,000.00
4	1	1	2	4	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kab.Tanah Datar	3 Dokumen	6,510,795	DAU		3 Dokumen	60,000,000.00
4	1	1	2	5	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Kab.Tanah Datar	3 Dokumen	22,599,771	DAU		3 Dokumen	200,000,000.00
4	1	1	2		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			100%	701,803,555			100%	2,249,316,849
4	1	1	2	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	267,380,028	DAU		1 Laporan	568,561,557.00
4	1	1	2	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	209,641,233	DAU		1 Laporan	842,999,110.00
4	1	1	2	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab.Tanah Datar	1 Laporan	224,782,294	DAU		1 Laporan	837,756,182.00
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			100%	5,131,378,742			100%	8,278,193,646
4	1	2	2		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan			100%	221,425,717			100%	1,252,385,225
4	1	2	2	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab.Tanah Datar	6 Dokumen	16,053,813	DAU		6 Dokumen	210,120,045
4	1	2	2	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab.Tanah Datar	5 Dokumen	29,407,004	DAU		5 Dokumen	411,400,000
4	1	2	2	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab.Tanah Datar	4 Dokumen	175,964,900	DAU		4 Dokumen	630,865,180

4	1	2	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%	4,476,257,725			100%	5,788,061,465
4	1	2	2	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab.Tanah Datar	20 Dokumen	4,446,257,725	DAU	20 Dokumen	5,755,061,465
4	1	2	2	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Telaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kab.Tanah Datar	1 Dokumen	15,000,000	DAU	1 Dokumen	16,500,000
4	1	2	2	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahragra, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linnas	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab.Tanah Datar	1 laporan	15,000,000	DAU	1 laporan	16,500,000
4	1	2	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		100%	424,726,300			100%	1,163,446,956
4	1	2	2	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab.Tanah Datar	30 Dokumen	50,000,000	DAU	30 Dokumen	320,846,956.00
4	1	2	2	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab.Tanah Datar	1 Perkara	337,494,500	DAU	1 Perkara	550,000,000.00
4	1	2	2	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab.Tanah Datar	1 Dokumen	37,231,800	DAU	1 Dokumen	292,600,000.00
4	1	2	2		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah		100%	8,969,000			100%	74,300,000
4	1	2	2	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab.Tanah Datar	0%	7,969,000	DAU	0%	60,000,000
4	1	2	2	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab.Tanah Datar	0%	1,000,000	DAU	0%	14,300,000
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan		100%	436,652,598			100%	2,322,398,410
4	1	3	2		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		100%	133,768,981			100%	776,082,888
4	1	3	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab.Tanah Datar	1 Dokumen	41,179,369	DAU	1 Dokumen	214,375,426
4	1	3	2	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab.Tanah Datar	5 Laporan	78,520,224	DAU	5 Laporan	428,372,983
4	1	3	2	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab.Tanah Datar	1 Dokumen	14,069,388	DAU	1 Dokumen	133,334,480
4	1	3	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		100%	113,195,017			100%	367,186,164
4	1	3	2	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab.Tanah Datar	1 Dokumen	38,663,082	DAU	1 Dokumen	165,000,000
4	1	3	2	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab.Tanah Datar	1 Dokumen	32,421,280	DAU	1 Dokumen	108,686,164
4	1	3	2	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab.Tanah Datar	12 Laporan	42,110,655	DAU	12 Laporan	93,500,000

4	1	3	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			100%	143,800,708			100%	845,000,000
4	1	3	2	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Tanah Datar	35 Dokumen	75,284,266	DAU		35 Dokumen	395,000,000
4	1	3	2	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab.Tanah Datar	12 Dokumen	57,664,400	DAU		12 Dokumen	260,000,000
4	1	3	2	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Tanah Datar	49 orang	10,852,042	DAU		49 orang	190,000,000
4	1	3	2		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			100%	45,887,892			100%	334,129,358
4	1	3	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab.Tanah Datar	1 Dokumen	12,843,600	DAU		1 Dokumen	183,097,276
4	1	3	2	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab.Tanah Datar	1 Dokumen	33,044,292	DAU		1 Dokumen	151,032,082

BAB V

PENUTUP

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar mempunyai Tugas Pokok menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja 2026 ini penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Based Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan serta sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar di tahun 2026 agar tercapainya visi dan misi Sekretariat Daerah demi menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ABDURRAHMAN HADI